

BAB II

DASAR-DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM

A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI

1. Sistem Ekonomi Modern

Sebelum mengenal sistem ekonomi modern kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian "Ekonomi". Ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (Greek) yang berarti "mengatur urusan rumah tangga"¹⁶ Di dalam bahasa Arab disebut "*Al Iqtishad*" yang berarti hemat. Sedang pengertian menurut istilah para pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka baik secara individual maupun kolektif baik menyangkut perolehannya, pendistribusiannya, maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁷

¹⁶ Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam.*, Terj. Mahfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 47.

¹⁷ Marzuki. *Tinjauan Tentang Filsafat Ekonomi Islam.* Makalah disajikan dalam seminar Nasional tentang ekonomi islam di UPN Jatim. Surabaya tgl. 1 Pebruari 1997. hal. 1.

Sedang pengertian "Sistem" dalam bahasa Arab di sebut "Nidzam" secara bahasa berarti suatu benang yang biasa di gunakan untuk merajut mutiara sehingga bisa teratur dan rapi. Menurut istilah berarti suatu lingkup yang mencakup dan mengatur segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan masalah pokok, baik berupa metode, program, tehnik, sarana dan lainnya.¹⁸

Didalam sistem ekonomi modern ada dua sistem yang amat dikenal sekarang ini yaitu sistem Kapitalis dan sistem Sosialis. Sistem Kapitalis dapat di temukan di negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, Jerman dan kini tinggal Amerika yang dominan. Sedang Sistem Sosialis dapat ditemukan di negara-negara seperti Yugoslavia, Uni Soviet, Cina, Korea Utara. Kini Uni Soviet tinggal keping-keping reruntuhan.

Sistem Kapitalis pertama kali rumusan ekonominya dipelopori dan dibangun oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal yaitu "*Wealt of Nations*" (1776) Adam Smith kemudian di nobatkan sebagai Bapak Ekonomi. Yang sesungguhnya ia semula seorang Pendeta yang berasal dari Skotlandia

¹⁸- Ibid., hal. 2.

kemudian menetap di Inggris. Dalam membangun ekonominya ia banyak di ilhami oleh fenomena perekonomian di Inggris. Setelah Adam Smith sebagai peletak mahzab Klasik, muncullah David Ricardo (1817).¹⁹

Kapitalisme sebagai sistem ekonomi berangkat dari pragmatisme²⁰ telah merumuskan masalah ekonomi terjadi sebagai akibat keterbatasan barang dan jasa sebagai alat pemuas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas.

Berangkat dari masalah ekonomi tersebut kaum kapitalis berusaha mencari pemecahannya dengan cara menaikkan GNP (penghasilan nasional rata-rata setiap orang) negaranya dengan asumsi bahwa dengan menaikkan GNP maka secara makro kebutuhan masing-masing individu akan terpenuhi. Kebijakan ini ditempuh, karena kemiskinan tersebut mereka asumsikan sebagai kemiskinan negara dalam

¹⁹-Mahfur Wahid. *Kapitalisme, Sosialisme dan Idiologi Alternatif Islam*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang Ekonomi Islam di UPN Jatim. Surabaya tanggal 1 Pebruari 1997. hal.2.

²⁰-Aliran filsafat yang menekankan pada kenyataan, pengalaman, penyelidikan dengan eksperimen serta kebenaran-kebenaran yang mempunyai akibat memuaskan. Lihat Pius Partanto dan Dahlan "Kamus Ilmiah Populer" (Surabaya: Arkola, 1994), 614.

memenuhi kebutuhan individu, dan bukannya kemiskinan individu. Di satu sisi distribusi alat pemuas kebutuhan diserahkan kepada hukum permintaan dan penawaran di pasar dengan adanya mekanisme harga. Artinya konsumsi masing-masing individu ditentukan oleh jumlah media alat penukar (uang) yang mereka miliki dengan kadar harga di pasar. Distribusi tidak diatur oleh negara. Negara hanya bertindak sebagai polisi untuk menjamin kebebasan individu. Sehingga di dalam ekonomi kapitalis harga merupakan sesuatu yang sangat penting, yang berfungsi sebagai tingkat penyeimbang antara tingkat produksi dan konsumsi. Dimana secara otomatis orang akan menekan pemenuhan kebutuhan yang tidak mampu mereka penuhi, dengan demikian sistem kapitalisme ini hanya memberikan izin kepada orang kaya untuk hidup sedang yang miskin tetap miskin. Akibatnya pembangunan model kapitalis mengakibatkan kepincangan-kepincangan ekonomi yaitu terjadi penumpukan harta di pihak orang kaya (konglomerasi) sedang yang miskin tetap lemah dalam kemiskinannya.²¹

²¹ Mahfur Wahid., *Op.cit.*, hal.4.

Sedang sistem Sosialisme atau termasuk di dalamnya Komunisme adalah lahir sebagai reaksi kedzaliman dari sistem kapitalisme. Aliran ini benar-benar mengakar terutama pada abad 19 dipelopori oleh Karl Marx (1867) dengan bukunya "*Das Kapital*". Marxisme menjadi ajaran suci di Rusia yang melakukan revolusi besar-besaran pada bulan oktober 1917 tepat 50 tahun setelah terbitnya buku *Das Kapital*.²² Sosialisme secara umum, termasuk yang distrukturalisasikan oleh Lenin merupakan antithesis Kapitalisme. Bila Kapitalisme melahirkan semboyan kebebasan individu atau "*Laissez Faire*"-nya, maka sebagai antithesisnya sosialisme justru sebaliknya ia menghapus kebebasan individualistik dan mengagungkan kolektivitas. Sehingga kaum sosialis sepakat bahwa alat pemuas kebutuhan harus di distribusikan secara merata atau asas kesamaan (equality). Meski harus dilakukan dengan "*The Iron law of Oligarcy*" (hukum tangan besi). Akibat dari tindakan kolektifitas yang di lakukan dengan memberangus hak pemilikan individu secara mutlak

²²-M.A. Mannan., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.*, Terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 14.

maka sosialisme telah mematikan produktifitas individu dan masyarakat. Sosialisme telah meningkatkan tingkat produksi dan pemerataan distribusi alat pemuas dengan menciptakan gejolak (unrest). Dimana gejolak itu sendiri bukan merupakan mekanisme untuk mengatur tingkat produksi dan distribusi melainkan hanya akan menghasilkan gejolak-gejolak masyarakat saja.²³

Dalam sistem Sosialisme ini ternyata juga menciptakan ketimpangan-ketimpangan ekonomi, dimana di dalam sistem yang diktator ini telah memasung bahkan mematikan kreatifitas individu dan masyarakat untuk berfikir dan bebas bertindak. Buruh dijadikan budak masyarakat, pendidikan terhadap moral individu diabaikan sehingga kedzaliman, penindasan dan balas dendam lebih berbahaya yang selanjutnya semangat untuk memupuk persaudaraan dan kerja sama yang baik tidak ada lagi sehingga sulit untuk menciptakan kesejahteraan dan kejayaan dalam sebuah negara.²⁴

²³-Mahfur Wahid., *Op.cit.*, hal. 4.

²⁴-Afzalur Rahman., *Doktrin Ekonomi Islam Jilid. I*, Terj. Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 7-8.

2. Sistem Ekonomi Islam

Di dalam uraian di atas, dari kedua sistem kapitalisme dan sosialisme memiliki kesamaan dalam memandang masalah ekonomi yang berpangkal pada aspek materi (barang dan jasa) dan mengesampingkan aspek non materi yang berpangkal pada moral spiritual. Dalam melihat masalah kebutuhan terkesan mencampur adukkan antara materi, sebagai alat pemuas kebutuhan dan kebutuhan itu sendiri. Dengan kata lain keduanya sama-sama tidak memilah antara sistem ekonomi dan ilmu padahal keduanya berbeda. Ilmu ekonomi berkaitan dengan sains murni yang universal. Ilmu ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa mengenal batas etnis, agama dan bangsa. Ilmu ini membahas tentang produksi serta bagaimana menentukan dan memperbaiki faktor-faktor produksi, dengan kata lain ilmu ekonomi pembahasannya bertumpu pada alat pemuas kebutuhan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedang sistem ekonomi pembahasannya bertumpu pada masalah bagaimana cara mendistribusikan kekayaan, bagaimana memilikinya, termasuk bagaimana melakukan mu'amalah terhadap kekayaan tersebut. Dengan demikian sistem ekonomi berkaitan dengan aliran, konsep tertentu (ideologi) yang di anut

oleh suatu bangsa.²⁵

Sistem ekonomi islam dalam memandang kebutuhan tidak bertumpuh pada aspek material akan tetapi juga aspek non material, spiritual dengan berlandaskan pada paradigma syari'ah. Untuk itu sebelum membahas lebih jauh maka ditarik suatu pengertian sistem ekonomi islam terlebih dahulu. Dalam hal ini mengutip beberapa pendapat para ahli dalam mendefinisikan sistem ekonomi islam yaitu :

- a. Abu La'la' Al-Maududi dalam bukunya "*Bainal Islam Wanad mil Ma'ashirati*" berpendapat bahwa sistem ekonomi islam adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan hak kepada individu untuk mengembangkan kekayaannya dengan di ikat oleh suatu ikatan moral atau perundang-undangan yang bertujuan supaya sumber-sumber kekayaan tidak berkumpul pada satu tempat secara berlebihan tetapi berpindah-pindah diantara berbagai individu sehingga setiap individu memperoleh haknya secara sah dan pantas.²⁶

²⁵-Mahfur Wahid., *Op.cit.*, hal. 4.

²⁶-Natsir Arsyad., *Sepercik Pemikiran Tentang Ekonomi Islam.*, Ed. Natsir Arsyad., (Yoogyakarta: Wira Muda, 1995), IV.

b. Smith Athif Az-Zain dalam bukunya "*Al Islam Khuthutun 'Aridhah Al-Iqtishad Al-Hakim Al-Ijtima'*" berpendapat bahwa sistem ekonomi islam yaitu, suatu sistem ekonomi yang bercirikan menegakkan dan mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan manusia baik secara individu maupun kelompok secara bersamaan dengan berlandaskan hukum syara'.²⁷

c. Suroso Imam Jazuli berpendapat bahwa sistem ekonomi islam adalah suatu sistem yang mandiri mendasarkan dirinya pada paradigma syari'ah dengan prinsip menerapkan asas efesiensi dan manfaat dengan memelihara kelestarian lingkungan dan bermotif mencari keberuntungan di dunia dan akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.²⁸

Sebagaimana tertera pada pengertian di atas telah jelas bahwa sistem ekonomi islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi islam mendasarkan dirinya pada paradigma

27. Abu Azam, "*Mencari Sistem Ekonomi Perspektif Islam*", Makalah disajikan dalam seminar ekonomi islam di UPN Jatim, tanggal 1 Pebruari 1997. hal. 4.

28. Suroso Imam Jazuli., "*Prinsip-prinsip ekonomi ilisma*" dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam.*, Ed. Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 39.

syari'ah dalam aktifitasnya berekonomi. Islam tidak memandang masalah ekonomi dari sudut Kapitalis yaitu memberikan kebebasan serta hak pemilikan pada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan, tidak pula dari sudut Sosialis yaitu menghapus semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Islam mengakui hak individu tanpa membiarkan merusak masyarakat, hal ini dilakukan dengan memberi batasan moral dan Undang-undang.²⁹

Dalam pandangan islam masalah ekonomi bertumpu pada ketimpangan distribusi alat pemuas kepada masing-masing individu. Sebab dalam pandangan islam kemiskinan yang kemudian menimbulkan ekonomi adalah kemiskinan individu bukan kemiskinan Negara. Agar distribusi alat pemuas kebutuhan ini bisa berjalan secara ideal islam telah mewajibkan masing-masing individu untuk bekerja bukan dengan cara menaikkan GNP dan diserahkan kepada mekanisme harga sebagaimana asumsi Kapitalisme, maupun menciptakan gejolak sebagaimana Sosialisisme. Sistem ekonomi islam memakai prinsip keadilan dalam distribusi dengan

²⁹-Afzalur Rahman., *Op.cit.*, hal. 10.

berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul kepada satu kelompok saja tetapi tersebar kesluruh masyarakat. Sebagaimana firman Allah (Q.S. Al Hasyr, 59:7) :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر ٥٩: ٧)

Artinya : "Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya saja diantara kalian".

(Q.S., Al Hasyr, 59:7)

Begitu juga di dalam kegiatan berproduktifitas bila sistem Kapitalisme dan Sosialisme secara mutlak ditentukan oleh tinggi rendahnya upah. Maka islam tidak memutlakkannya karena upah adalah salah satu faktor saja untuk me naikkan produktifitas. Di dalam negara islam kegiatan-kegiatan yang tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak dapat di dorong misalnya memproduksi minum-minuman keras, perjudian, pasar gelap, prostitusi, Riba' dan semua prilaku konsumen dan produsen tunduk pada larangan islam yang berprinsip pada kesejahteraan umum, sebagaimana di atur di dalam syari'at islam misalnya yaitu :

- a. Semua sarana dalam mendapatkan kekuasaan secara tidak sah dilarang, karena hal ini akan

membinasakan suatu bangsa (Q.S., An-Nisa', 4:29). Oleh karena itu telah di tetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dan intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan. Hal ini begitu dibatasi sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban moral. Untuk tujuan ini di singgung dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة ٢: ١٧١)

Artinya : " Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langka-langka syetan sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu.

(Q.S. Baqarah, 2:168)

- b. Suatu negara islam hanya dapat mendorong kegiatan-kegiatan sah, yang sepenuhnya sejalan dengan kebajikan sosial. Karena itu islam sangat tidak menyetujui monopoli sumber daya oleh segelintir manusia Kapitalisme. (Q.S., Al-Hasyr, 59:7) dan tekanannya selalu terletak pada pemanfaatan sosial yang berguna saja.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ *

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rexeke yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."
(Q.S., Al-Fatir, 35:29)

- c. Keserakhahan dianggap sebagai sifat negatif dan merusak kekayaan orang-orang kikir, selain hanya memberikan keuntungan bagi mereka, juga menjadikan rintangan bagi pertumbuhan moral dan spiritual mereka (Q.S., Ali Imron, 3:180), sebaliknya hidup bermewah-mewahanpun dikecam.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الانعام ١٤١:٢)

Artinya : "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."
(Q.S., Al-An'am, 6:141)

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ لَهُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا * (الاسراء ١٧: ٢٧)

Artinya : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan, dan syetan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."
(Q.S., Al-Isra', 17:27)

Kemakmuran dapat tercapai bukan dengan keserakahkan atau tidak pernah memberi, melainkan dengan memanfaatkan harta demi kepentingan Allah, yakni guna pengabdian mahluk-mahluknya. (Q.S., Muhammad, 47:38).³⁰

Dengan cara di atas islam mengatur kegiatan-kegiatan untuk memperoleh uang (harta kekayaan) dan mengeluarkan atau membelanjakannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Disamping itu di dalam sistem ekonomi islam juga mempunyai prinsip-prinsip dasar, dalam hal ini Afzalur Rahman berpendapat setidaknya menyangkut sembilan faktor di antaranya yaitu :

1. Kebebasan Individu, individu mempunyai hak kebebasan untuk berpendapat dan membuat suatu keputusan bila dianggap perlu. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan di masyarakat.
- b. Hak terhadap harta, islam mengakui hak setiap individu untuk memiliki dan mengembangkan harta

³⁰-M.A. Mannan., *Op.cit.*, hal. 22-23.

kekayaan. Walaupun demikian hak terhadap harta itu diberikan batasan-batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini akan ditetapkannya suatu Undang-undang.

- c. Ketidaksamaan Ekonomi dalam batasan yang wajar, islam mengakui ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang tetapi tidak membiarkan menjadi bertambah luas, dengan mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batasan yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d. Kesamaan Sosial, islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung menggalakkan kesamaan sosial. Sehingga pada tahap tertentu kekayaan negara tidak hanya di miliki dan dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu dalam ekonomi islam setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan dan menjalankan berbagai aktifitas ekonomi.
- e. Jaminan Sosial, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dengan alasan

"hak untuk hidup" dan terdapat persamaan sepenuhnya antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

- f. Distribusi kekayaan secara meluas, islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu (individu) dan menganjurkan distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat, prinsip ini digambarkan dalam firman Allah.

كَيْ لَا يَكُونَ زَوْلَهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
(الحشر، ٥٩: ٧)

Artinya : "Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya saja diantara kamu".
(Q.S., Al-Hasyr, 59:7)

- g. Larangan menumpuk kekayaan, sistem ekonomi islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan tersebut untuk tidak terjadi dalam suatu negara.
- h. Larangan terhadap organisasi anti sosial, Sistem ekonomi Islam melarang semua prkatek yang merusak dan anti sosial misalnya : perjudian, minuman berakohol, prostitusi, riba, perdagangan narkoba, pasar gelap, semua ini di larang karena mengakibatkan kekacauan dalam

masyarakat.

- i. Kesejahteraan individu dan masyarakat, Islam mengakui kesejahteraan individu dan masyarakat yang saling melengkapi yang satu dengan yang lainnya, bukannya bersaing dan saling bertentangan antara mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredahkan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.³¹

B. MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI MODERN

Sejak zaman Merkantilisme (zaman ekonomi kolonialis) banyak Sistem ekonomi modern yang gagal dalam menjalankan tata perekonomian dunia. Untuk itu para ahli mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dunia yang diselenggarakan bulan april 1984, yang dihadiri antara lain : Willis Clark (Wakil presiden Bank Dunia), G. Fernandes (Italia), H. Helberg (WHO) dan lainnya, telah timbul gagasan pemikiran untuk mencari era kebijakan baru (*New Economy Policy*).

Pertemuan tersebut di lanjutkan pada tahun 1985 yang di hadiri 150 ahli, di antaranya Samir Amin (mesir), Ela Batt (India), Trevor Hanock (Canada),

³¹-Afzalur Rahman., *Op.cit.*, hal. 8-10.

Hezel Henderson (Direktris Pusat Study Alternatif Ekonomi masa depan dari Florida State University, USA) dan lain-lain. Hazel Henderson telah melihat munculnya ekonomi Islam sebagai Kebijakan Alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dunia dewasa ini.³²

Dalam kaitannya dengan hal ini Allah swt.

berfirman :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكْرِهِ قَدْ فَرَّبَكُمْ اَعْلَامُ هُوَ اَهْدَى
سَبِيلًا (الاسراء ١٧: ٨٤)

Artinya : "Tiap-tiap orang bertindak menurut caranya masing-masing , maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."

(Q.S., Al-Isro', 17:84)

Menurut Prof. Suroso Imam Jazuli dewasa ini ada 10 Sistem ekonomi besar dunia yang telah gagal untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pokok dalam ilmu ekonomi. Beberapa sistem ekonomi besar dunia itu antara lain adalah :

a. Merkantilis

Sistem ini telah menghasilkan ekonomi kolonialisme jelas tidak sesuai dengan harkat dan

³² Suroso Imam Jazuli., "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam , Berbagai Aspek Ekonomi Islam. Ed. Rusli Karim. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 31.

martabat manusia, sehingga setelah banyak negara jajahan mau merdeka, habislah riwayat ekonomi ini.

b. Klasik dan Neo Klasik

Sistem ekonomi Klasik lebih mengkonsentrasikan diri pada pendekatan sisi penawaran dengan perdagangan internasional yang bebas, sedang sistem ekonomi Neo Klasik dengan pendekatan sisi permintaan juga telah hancur akibat terdapat perang tarif dan quota antara negara, sehingga keuntungan komparatif yang diimpikan dari perdagangan internasional yang bebas tersebut juga telah gagal.

c. Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada investasi serta pemilikan faktor produksi lainnya oleh swasta serta distribusi dan perkembangan tingkat kemakmuran diserahkan sepenuhnya pada para individu serta perusahaan swasta dalam kondisi/persyaratan persaingan bebas juga tidak dapat dipertahankan lagi.

Amerika telah menjadi korban sistem ini yang mengakibatkan separoh dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420. unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki/dikuasai oleh hanya sebanyak 102 unit perusahaan raksasa saja

(kekayaan rata-rata tiap unit perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US).

Distribusi antar negara bagian juga tidak merata. Di mana negara federal sebelah timur jauh lebih kaya dibanding negara sebelah barat dan kepulauan. Perbedaan tingkat kemakmuran perkapita antara negara antara negara bagian yang berpendapatan rendah dan negara bagian yang berpendapatan tinggi ada sekitar US\$ 10,000 pertahun.

d. Sosialis

Sistem sosialis baik di Eropa Barat (Sosialis Demokrat di Inggris) dan Eropa Timur seperti di Polandia tidak mampu mempertahankan stabilitas ekonominya akibat sering timbulnya pemogokan kerja baik karena tuntutan kenaikan gaji maupun lebih menginginkan kebebasan terhadap tekanan dari pihak majikan/penguasa perusahaan serta pemerintahan. Peningkatan produktivitas, neraca pembayaran internasional serta nilai inflasi merupakan masalah yang belum pernah terselesaikan hingga dewasa ini. Dalam periode 1973-1984 rata-rata inflasi di Inggris setahun mencapai 13,8% dan di Polandia sebesar 19,4%. Pernah muncul sistem ekonomi sosialis-diktator-militer di Jerman,

Jepang dan Italia. Sistem ini tenggelam dalam perang dunia pertama dan kedua.

e. Komunis

Sistem ekonomi komunis mulai dipakai setelah revolusi Rusia tahun 1917. Namun ternyata sistem ini tidak bertahan lama di negara kelahiran Karl Marx tersebut, sebab Alexander Kerensky menggantikannya dengan sistem Sosialis Demokrat yang kemudian hancur dan diganti dengan sistem Sosialis Diktator oleh Lenin. Karena sistem ini tidak berhasil maka Lenin membuat kebijakan yang berbau kapitalis yang antara lain adalah : memperluas lembaga perbankan dan moneter lainnya, modal asing dapat masuk, tenaga ahli dari kapitalis diminta bantuannya untuk menangani industri berat serta sektor pertanian dapat diusahakan oleh perusahaan swasta.

Sejak itu tamatlah sistem ekonomi komunis di Rusia. Komunis di Cina semula mengikuti jejak di Rusia, hingga perang korea selesai Cina masih menganut sistem *kolektifvisme* di sektor pertanian dan tidak memakai kebijakan Lenin. Sistem ekonomi Komunis Cina dengan perencanaan ekonomi terpusat ini hanya bertahan hingga tahun 1958. Perencanaan secara desentralisasi dilaksanakan dengan

pemberian otonomi terhadap komune-industri lokal dan kolektivisme pertanian di daerah.

Komunis Yugoslavia merupakan campuran antara sosialisme demokrat dan komunisme Soviet, namun ternyata Yugoslavia tetap mempertahankan hubungan bebasnya dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Selain itu peranan desentralisasi dan otonomi cukup luas. Dengan demikian jelas sistem ekonomi komunistis sudah tidak dipakai lagi secara konsekuen.

f. Sistem Ekonomi Berencana di Dunia Ketiga

Sistim ini banyak dipakai oleh beberapa negara berkembang dalam periode 1960-1970 yaitu dianut oleh : India, Pakistan, Mesir, Meksiko dan Indonesia (periode-1960-1966). Dalam sistem ini kemacetan ekonomi akan didobrak lewat pengembangan industri berat (*heavy industries take for frontal attack of economic stagnation*). Hasil akhirnya sebagian besar proyek industri berat macet karena kurangnya dana domestik, terjadi inflasi yang kronis serta terdapat banyak pengangguran.

g. Monetary Orde

Kaum monetaris percaya bahwa semua permasalahan ekonomi akan dapat terselesaikan lewat kebijakan moneter. Ide kaum Moneteris ini

gagal pula, sebab terjadi penyimpangan fungsi lembaga perbankan dan keuangan serta uang sebagai alat tukar juga tidak dapat berfungsi penuh.

Bank yang seharusnya sebagai lembaga pencipta kredit ternyata sebagian besar keuntungannya diperoleh dari perdagangan mata uang dan kertas berharga lainnya. Uang yang semula sebagai alat tukar berubah menjadi mata dagangan. Terdapat penyelewengan fungsi ini mengakibatkan kekacauan dalam sistem moneter terutama yang menyangkut peredaran uang dalam masyarakat dan timbullah berbagai spekulasi di lembaga perbankan, institusi keuangan lainnya pada saat terjadi akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi dari segi kebijakan moneter saja.

Selain itu lewat kebijaksanaan Anggaran Negara yang defisit juga tidak dapat memperbesar kesempatan kerja atau pun menekan jumlah pengangguran.

h. Orde Strukturalis

Orde ini akan mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi negara lewat pembangunan ekonomi dengan perubahan kegiatan struktur sektoral. Namun demikian hasil akhir yang diperoleh justru makin meluasnya sektor informal yang tidak sehat dan

pengangguran secara struktural.

i. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ini merupakan campuran antara sebagian subsistem sosialis dengan sub-sistem negara setempat.

Dalam percampuran sistem ini akan muncul berbagai kemungkinan yaitu timbul kelompok-kelompok seperti kelompok kapitalis birokrat ataupun sosialis birokrat serta dapat juga muncul *Socio kapitalis birokrat*. Hasil akhir dari ekonomi ini adalah *enefesiensi* yaitu semakin merosotnya golongan menengah kebawah.

j. Post Industrial State Economy

Setelah revolusi industri yang menghasilkan berbagai jenis teknologi di bidang tehnik biologi, tehnik kimiawi maupun tehnik mekanik ternyata keberhasilan di bidang ekonomi harus dibayar dengan kerusakan sumber daya alam, lingkungan hidup maupun yang lain. Hal ini tidak dapat diukur peningkatan perkembangan ekonomi dari indikator ekonomi saja tetapi juga indikator non ekonomi.³³

³³-*Ibid.*, hal., 31-35.

C. ASAL USUL EKONOMI ISLAM

Untuk mengetahui asal usul lahirnya prinsip ilmu ekonomi islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah tafsiran dan penafsiran kembali asas-asas ini (yang mengatur bagian persoalan pokok) seperti nilai, pembagian kerja, sistem harga, kekuatan permintaan dan penawaran, produksi dan konsumsi, perpajakan, lalu-lintas perdagangan dan lain-lain semua itu dapat di dalami atau digali kembali sejak munculnya sejumlah cendekiawan dan ahli ekonomi muslim yang telah memberikan dasar-dasar operasional dan kesinambungan ide-idenya tentang ekonomi islam pada awal mula islam seperti sarjana-sarjana muslim : Abu Yusuf (731-798), Yahya bin Adam (meninggal 818), El Hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibnu Thaimiyah (1261-1328), Ibnu Khaldun (133-1406) Shah Waliullah (1702-1763), Ibnu Hazm (wafat 1064), Al Ghozali (1056-1111), Al Farabi (wafat 654), dan masih banyak lagi yang lain-lain.³⁴

Diantara sumbangan-sumbangan pemikiran ilmuwan muslim pada awal mula islam tentang ekonomi

³⁴-M.A. Mannan. *Op.cit.*, hal. 24. Lihat juga Monzer Khaf. "Ekonomi Islam; tela'ah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam, Terj. Mahnun Husin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 8.

diantaranya yaitu :

- a. Abu Yusuf, sumbangannya pemikirannya tentang pengaturan keuangan umum (dalam bahasa modern Akutansi), pengaturan terhadap peranan Negara, pengaturan tentang pertanian yang sempat berlaku sampai sekarang.
- b. Ibnu Thaimiyah, sumbangannya tentang "harga ekwivalen" (Keseimbangan harga), pengaturan pasar dan pengendalian harga, tekanannya terhadap peranan Negara, pemenuhan dan penjaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Dan gagasannya tentang hak milik memberikan petunjuk penting tentang teori kebijakan ekonomi islam zaman sekarang ini. karya-karyanya yang termashur tentang ekonomi adalah "Al Siyasaah Syari'ah fil Ishlah al-Roiwal Ro'iah" (Hukum publik dan privat dalam islam, "Al Hisbah wa mas'uliyah al hukmah al Islamiyah" (pengawasan umum terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial serta peran negara).
- c. Tusi, sumbangannya menggaris bawahi tentang pentingnya nilai pertukaran, pembagian kerja, kesejahteraan rakyat. Karyanya yang termashur berbahasa Persia "*Akhlaqi Nasiri*" menurutnya bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu yang lama

tapi karena orang saling bekerja sama, timbal balik saling melengkapi satu sama lain melakukan profesi yang berbeda-beda, maka sarana ekonomi dapat tersedia untuk semua orang. dari sistem pembagian kerja inilah akhirnya menimbulkan struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia.

- d. Ibnu Khaldun, cendekiawan Arab termashur dari Tunisia seluruh dunia diakui sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial. Ia memberikan definisi ilmu ekonomi yang lebih luas dari pada definisi Tusi, karena ia melihat ada hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. Dalam bukunya tentang "Ketentuan akal dan etika" menggunakan istilah dalam ilmu ekonomi "*Al Massa*" atau "*Al Jambuur*" hal ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan massa bukan kesejahteraan individu. Hukum ekonomi dan sosial banyak dipengaruhi massa dan tidak dapat banyak dipengaruhi oleh individu yang terkucil. Ibnu Khaldun mengakui ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi politik, sosial, etika dan pendidikan. dalam bukunya yang termashur "*Al Muqaddimah*" ia memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi seperti : pembagian

kerja, teori nilai, teori pertumbuhan penduduk, pembentukan modal lintas perdagangan dan lainnya. Secara keseluruhan cendekiawan muslim pada umumnya dan Ibnu Khaldun pada khususnya dianggap sebagai pelopor perdagangan dari penulis klasik (seperti Adam Smith, Ricardo, dan Malthus) serta penulis neo Klasik (seperti Keynes).³⁵

- e. Imam Al Ghozali, sumbangan pemikirannya terlihat dalam karya-karyanya yang terdapat dalam buku yang berjudul antara lain : "Al Islam Wal Audho'ul Iqtishodiyah" (islam dan kedudukan ekonomi), "Al islam wal Muftara 'Alaihi bainas Syu'iyah wa Ra'sumaliyyin" (Islam yang didiskriditkan antara sosialisme dan kapitalisme).³⁶

D. METODOLOGI EKONOMI ISLAM

Metodologi dalam pembahasan ini di maksudkan sebagai cara yang tepat untuk menganalisis literatur-literatur ekonomi islam guna mempelajari dan mengkaji lebih mendalam tentang sistem ekonomi islam.

³⁵-M.A. Mannan., *Op.cit.*, hal. 24-25.

³⁶-Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani perss, 1995), 31'

Sebelum membahas lebih jauh tentang metode yang di gunakan dalam sistem ekonomi Islam, terlebih dahulu mengetahui kelompok-kelompok yang mempermasalahkan keberadaan ekonomi Islam. Sebagaimana yang telah di terangkan di awal pembahasan bahwa di dalam kata ekonomi Islam ada dua kandungan makna yang dipertentangkan yaitu Ekonomi sebagai lingkup pengetahuan sosial dan Islam sebagai lingkup ajaran kitab suci. Di dalam mendiskusikan hubungan ilmu pengetahuan dan Kitab suci para ilmuwan terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. kelompok yang menolak keberadaan ekonomi Islam

Kelompok ini secara apriori menolak mendiskusikan sekurangnya acuh atau bahkan terheran-heran apalagi jika dikatakan ada hubungan yang harmonis antara ilmu pengetahuan dan kitab suci. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak ada hubungan sedikitpun (paradoks) antara ilmu pengetahuan dan kitab suci. Kelompok ini terpengaruh ajaran *Materealistik* yang menunjukkan sikap acuh bahkan merendahkan soal-soal agama.

b. Kelompok yang menerima keberadaan ekonomi Islam

Kelompok ini secara serius, mendiskusikan bahkan telah melakukan serangkaian riset, bukan saja mendapat hubungan yang harmonis antara kitab

suci Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, bahkan kelompok ini berkesimpulan adanya "*Integrasi Total*" antara firman Allah (Ayat qouliyah dan tindakan Allah (ayat qouniyah) akan didapatkan dalam Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan.³⁷

Sedang kelompok yang menerima tentang keberadaan ekonomi Islam masih dibagi lagi dalam dua kelompok yaitu kelompok yang menamakan dengan istilah "*Ekonomi Islami*" dan kelompok yang menamakan dengan istilah "*Ekonomi islam*" (*Isalmic Economics*) setidaknya itulah yang dirasakan oleh zaman (1986). Kelompok-kelompok itu adalah :

a. Kelompok yang menamakan dengan istilah Ekonomi Islami

Bagi sebagian orang berpendapat bahwa ekonomi Islami berkaitan dengan persoalan-persoalan zakat, riba, perdagangan, sadaqah dan sejenisnya yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pengertian seperti ini memberi kecenderungan untuk memberikan batasan yang jelas (tetapi sempit) dari ekonomi islam. Secara khusus model pertama ini terkait dengan pembahasan

³⁷-Sahri Muhammad. "Sosialisasi dan Pelembagaan Ekonomi Islam", dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Ed. Rusli karim. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), 187-188.

prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada awal mula islam dan amat dekat bersinggungan dengan persoalan fiqh.

Model pertama ini lebih di dominasi oleh para ahli agama (*religius scholars*) atau paling tidak memiliki latar belakang ilmu agama, khususnya di bidang hukum islam cukup menguasai.

b. Kelompok kedua menamakan dengan Ekonomi islam

Kelompok kedua ini lahir sebagai akibat munculnya pemikiran kritis terhadap sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialis. Pemikiran kritis ini di ilhami oleh apa yang secara eksplisit dan implisit dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits tentang sebagian prinsip-prinsip pokok ekonomi islam. Persepsi lain dari kelompok kedua ini berpendapat bahwa melihat ekonomi islam pada dasarnya hanya merupakan penerapan (dengan sedikit pemilihan) prinsip-prinsip ekonomi modern (Kapitalisme dan Sosialisme) tetapi lebih cenderung pada apa yang di sebut pertanggung jawaban memilih aspek-aspek secara jelas tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Kedua pemahaman terakhir ini kadang kala bersinggungan tetapi tidak jarang juga berada dalam posisi konflik.

Model pemahaman kelompok kedua ini lebih di dominir oleh cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan ekonomi untuk tidak sekedar mengatakan lebih banyak berlatar belakang pendidikan "Sekuler" sebagian ekonom kini berada dalam latar terdepan dalam perdebatan perumusan ekonomi islam. Dalam kategori kedua ini mereka banyak berasal dari negara-negara Pakistan, Malaysia, Banglades dan Indonesia.³⁸

Dalam pendekatannya kedua kelompok tersebut menggunakan metode untuk menganalisis literatur-literatur ekonomi islam. Menurut Monzer Khaf, P.hd. setidaknya tidak terlepas dari kedua metode yang diterapkan yaitu :

- a. Metode Deduksi, metode ini di kembangkan oleh para ahli hukum islam, fuqaha' dengan cara mengaplikasikan terhadap ekonomi islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber islam yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah.

³⁸ Swarsono., "Pendapat dan Belanja Negara dan Regulasi dalam ekonomi islam", dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Ed. Rusli Karim, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 101-102.

b. Metode Restropektif, metode ini banyak dikembangkan oleh sebagian besar penulis muslim kontemporer yang merasakan dari tekanan-tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia islam dan berusaha untuk mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat muslim dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan.³⁹

Dalam mengaplikasikan terhadap ekonomi islam yang dalam kerangka hukumnya berkonsultasi dengan sumber-sumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terlepas dari kajian tentang sejarah perekonomian islam yang berkembang di awal perkembangan islam, karena itu aspek sejarah merupakan faktor penting sebagai laboratoriumnya umat manusia, dan akan memberikan dua spek utama. Pertama, membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kedua, mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini seperti sejarah unit-unit ekonomi,

³⁹. Monzer Khaf, *Ekonomi Islam; Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam.*, Terj. mahnun Husin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 12.

individu-individu, badan-badan usaha serta ilmu ekonomi itu sendiri.

Namun perlu di ingat adanya dua bahaya jika aspek historik itu diteliti. Yang pertama, bahaya kejumbuhan antara teori dan aplikasi-aplikasinya dan kedua pembatasan antara teori dan sejarahnya. Bahaya pertama muncul ketika pemikir ekonomi muslim modern tidak membedakan secara jelas antara konsepsi islam dengan aplikasi-aplikasi historiknya. Hal ini tampak jelas dalam cakupan keuangan Negara yang ada di dalam perpustakaan islam kontemporer menganggap sumber utama sebagai sumber-sumber yang ada pada masa negara islam besar, sejak masa Umar bin Khattab sampai Harun ar Rasyid. Sedikit sekali memperhatikan kepada pengembangan teori tentang keuangan negara yang di dasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bahaya kedua muncul ketika para ahli ekonomi Islam menganggap pengalaman historik itu mengikat bagi kurun waktu sekarang. Hal ini tercermin dalam ketidak mampuannya untuk mengancang Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, yang pada gilirannya menimbulkan teori ekonomi Islam yang hanya bersifat historik dan tidak bersifat idiologik. Hal ini tercermin ketika dalam ekonomi islam yang hanya berbicara tentang harta dan penghasilan konsumsi yang tidak semestinya, dan

sebagainya bukan mengenai penanggulangan mekanisme makroekonomik dari sistem ekonomi islam itu. Tidak diragukan bahwa beberapa persoalan di negara-negara islam sekarang ternyata serius dan penting, dan bahwa persoalan-persoalan tersebut seharusnya dibahas dalam kerangka ekonomi islam itu merupakan sistem yang pokok bahasannya, misalnya nasionalisasi industri dan penataan pemilikan tanah (*land reform*), lantas apa yang terjadi setelah dapat diraih ? apa yang dapat dilakukan oleh seperti katakanlah untuk industri yang telah dinasionalisasikan terhadap perekonomian yang sehat dengan pertumbuhan yang normal disatu pihak dan tindakan-tindakan darurat yang dapat diambil oleh para pejabat penanggung jawab masalah ekonomi untuk membahas masalah sementara seperti perang, dalam keadaan darurat, ketidakadilan dalam distribusi barang-barang atau kemiskinan dipihak lain. Dalam hal ini seharusnya diberi pembatasan agar kajian ekonomi islam tidak parsial terhadap gejala-gejala peralihan yang akan menimbulkan pemborosan setelah pembangunan-pembangunan negara islam itu.

Dari hal diatas terjadi tidak berarti bahwa persoalan-persoalan pembangunan itu tidak boleh mendapat perhatian langsung dari para ahli ekonomi Islam, melainkan ditanggulangi dalam kerangka teori

umum ekonomi Islam yang mempertahankan relevansinya dengan semua tahap pembangunan ekonomi dan suasana politik.⁴⁰

Begitu juga dalam pembahasan mengenai ekonomi islam harus ada pembatasan antara kajian hukum fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Tidak adanya pemisahan dalam pembahasannya akan mengakibatkan kesalahan. Di lihat dari segi pembahasannya Fiqh Mu'amalah itu membahas permasalahan dengan menetapkan kerangka hukumnya sedang Ekonomi Islam membahas proses dan penanggulangan mengenai prilaku manusia yang berhubungan dengan teori produksi, distribusi dan konsumsi. Akibat yang lainnya jika tidak ada pemisahan (demarkasi) maka akan mengaburkan permasalahan misalnya ketika membahas teori konsumsi berubah menjadi pernyataan kembali tentang hukum islam mengenai makanan dan minuman bukan mengenai prilaku konsumen terhadap sejumlah barang konsumsi yang tersedia. Begitu juga ketika membahas teori produksi maknanya diperkecil tentang hak pemilikan dalam islam bukan mengenai prilaku perusahaan sebagai unit produksi.⁴¹

⁴⁰-*Ibid.*, hal. 9-10.

⁴¹-*Ibid.*, hal. 6-7.